

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) OLEH
BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH KANTOR CABANG
PEMBANTU (KCP) MAKASSAR TAMALANREA**

RAHAYU BUDIARTO

E21114029



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRAK

Rahayu Budiarto (E211 14 029), menyusun skripsi dengan judul : “Efektifitas Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makassar Tamalanrea”, xvii + 68 halaman + 5 gambar + 18 pustaka + (1945-2020) + 10 lampiran + Dibimbing oleh Dr. H. Nurdin Nara, M.Si dan Drs. Nelman, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektifitas implementasi KUR oleh BRI syariah KCP Makassar Tamalanrea.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, informan kunci dalam penelitian ini adalah nasabah KUR BRI syariah dan pegawai AOM (account officer mikro) BRI syariah. Fokus penelitiannya adalah efektifitas implementasi KUR yang dianalisis menggunakan 4 indikator menurut Matland (1995) yaitu Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksana, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. dimana jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui, wawancara dan observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen dan data yang dimiliki Bank Rakyat Indonesia syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kredit Usaha Rakyat telah berkinerja. dari 4 indikator yang digunakan telah memberikan kinerja yang baik walaupun untuk indikator Ketepatan Kebijakan dan Ketepatan Lingkungan masih perlu untuk diperhatikan dan ditingkatkan.

Kata Kunci : Efektifitas Implementasi, Kredit Usaha Rakyat, Bank Rakyat Indonesia.



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Rahayu Budiarto (E211 14 029), compiled a thesis with the title: "Effectiveness of People's Business Credit Implementation (KUR) By Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sharia Makassar Branch Office (KCP) Makassar Tamalanrea", xvii + 68 pages + 5 pictures + 18 libraries + (1945-2020) + 10 attachments + Supervised by Dr. H. Nurdin Nara, M.Si and Drs. Elma, M.Si.

This study aims to explain the effectiveness of the implementation of KUR by BRI syariah KCP Makassar Tamalanrea.

The method used in this research is descriptive qualitative, key informants in this study are customers of KUR BRI Syariah and employees of AOM (micro account officer) BRI Syariah. The focus of his research is the effectiveness of KUR implementation which is analyzed using 4 indicators according to Matland (1995), namely Policy Chief, Implementation Accuracy, Target Accuracy, and Environmental Accuracy. Collecting data used are interviews, observations and documents relating to the problem in question. Where the type of data consists of primary data obtained through interviews and direct observations in the field, while secondary data sourced from documents and data held by Bank Rakyat Indonesia Syariah .

The results of this study indicate that the People's Business Credit Implementation has performed. of the 4 indicators that have been used have given good performance even though the indicators for Policy Accuracy and Environmental Accuracy still need to be noticed and improved.

Keywords: Effectiveness of Implementation, People's Business Credit, Bank Rakyat Indonesia.



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Rahayu Budiarto
NIM : E211 14 029
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yan berjudul “Efektifitas Implementasi Kredit Usaha Rakyat Oleh BRI syariah Kantor Cabang Pembantu Makassar Tamalanrea” adalah benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah dinyatakan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 25 Juni 2020

Yang menyatakan,



Rahayu Budiarto



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

N a m a : Rahayu Budiarto
N I M : E211 14 029
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Efektifitas Implementasi Kredit Usaha Rakyat Oleh BRI syariah kantor Cabang Pembantu Makassar Tamalanrea

Telah diperiksa oleh pembimbing I dan pembimbing II, dan dinyatakan telah sesuai dengan saran tim penguji skripsi. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 25 Juni 2020

Menyetujui :

Pembimbing I

Dr. H. Nurdin Nara, M.Si
NIP: 196309031989031002

Pembimbing II

Drs. Nelman, M.Si
NIP:196107171987021001

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Saya bertandatangan dibawah ini;

Nama : Rahayu Budiarto
NIM : E211 14 029
Program studi : Administrasi Publik
Judul : Efektivitas Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh
Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang
Pembantu (KCP) Makassar Tamalanrea

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Skripsi Program Sarjana
Administrasi Publik Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 14 juli 2020

Dewan Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Nurdin Nara, M.Si

Sekretaris : Drs. Nelman Edy, M.Si

Anggota : 1. Prof. Dr. Rakhmat, M.Si

: 2. Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah, puji syukur tiada hentinya Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang Maha Melihat Maha mengetahui Maha pengasih dan lagi Maha Penyayang serta berkat rahmat dan hidayah-Nya Yang memberi kemudahan kepada siapapun yang Ia khendaki sehingga Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “Efektifitas implementasi kredit usaha rakyat (KUR) oleh BRI syariah KCP makassar tamalanrea.” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) pada Prodi Administrasi Publik Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Baginda Nabiullah Muhammad SAW. Sang Revolusioner Sejati yang atas izin Allah SWT beliau membawa manusia dari alam kejahilaaan menuju alam yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Beliau sosok yang menjadi panutan kita dalam menjalani hidup ini, dan kelak InsyAllah kita akan dikumpulkan bersamanya didalam Surga. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Dalam pelaksanaan dan proses penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Sehingga Penulis terbuka, dengan senang hati menerima saran dan kritikan yang membangun untuk perbaikan karya tersebut kedepannya. Dalam penyelesaian skripsi ini tentu banyak pihak yang selalu mendoakan, menghibur dan memotivasi Penulis. Maka melalui kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang

tua Penulis, Ibunda **Uminah** dan Ayahanda **Suwandi**, yang tercinta, yang senantiasa mendidik, mendukung dan mendoakan penulis hingga detik ini. Serta kasih sayang dan kesabaran yang tulus tiada hentinya. Terima kasih pula untuk Keluarga Penulis yang begitu berarti dan tersayang yaitu kedua saudara kandung Penulis **Fajar Budi Santoso** dan **Ainur Fauiziah** yang telah berperan penting dalam hidup penulis serta memberikan nasihat yang tak terhingga, yang menjadi penyemangat penulis untuk merajut masa depan yang lebih baik semoga Allah menambahkan Hidayah-Nya serta Rahmat Allah senantiasa menyertai kalian dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih pula untuk semua kerabat yang tak bisa saya sebutkan satu-persatu semoga kelak kita semua dipertemukan dalam surga Allah *Aamiin ya robbal Alaamiin*.

Selain itu, selama menempuh pendidikan dan penyusunan skripsi ini, Penulis memperoleh dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan staf.
2. Bapak **Prof. Dr. Armin, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak **Dr. Nurdin Nara, M.Si**, selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang senantiasa memeberikan dorongan, arahan dan motivasi untuk Penulis menyelesaikan studinya. Penulis sangat berterima kasih dan berharap semoga Bapak senantiasa berada dalam lindungan-Nya.

4. Bapak **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, MAP** selaku Sekertaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
5. Ibu **Dr. H. Hasniati, S.Sos., M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi pada masanya yang telah banyak membantu penulis selama menjajaki bangku perkuliahan.
6. Bapak **Dr. Nurdin Nara, M.Si** selaku Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan untuk Penulis selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini meskipun ditengah kesibukannya. Penulis sangat berterima kasih dan berharap semoga Bapak senantiasa berada dalam lindungan-Nya.
7. Ibu **Drs. Nelman Edy, M.Si** selaku Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing II yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penulis meskipun ditengah kesibukannya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih dan berharap semoga Ibu senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Bapak **Prof. Dr. Rakhmat, M.Si** dan **Prof. Dr. Moh. Tahir Haning, M.Si.** Bapak selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktu dan memberikan saran dan kritikan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih dan berharap semoga bapak senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
9. Seluruh **Dosen Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS.** Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan untuk Penulis selama kurang lebih 4

tahun. Semoga Penulis bisa memanfaatkannya sebaik mungkin serta ilmu yang Bapak dan Ibu berikan menjadi Berkah dan amal dari pengabdian Bapak dan Ibu diterima Di sisi Allah SWT.

10. Seluruh Staff Departemen Ilmu Administrasi (Ibu Rosmina, Pak Lili, Ibu Darma, dan Ibu Cia) dan para Staff di lingkup FISIP UNHAS (Pak Jaya, Ibu Ija, Pak Nadir, Pak Revi dan Pak Sainuddin serta staf lain tanpa terkecuali) yang senantiasa memberihkan bantuan dan arahan sehingga Penulis mendapat kemudahan untuk mengurus segala urusan terkait administratif akademik begitupula kepada Bapak Mustari dan Pak Udin yang dengan sabar menjaga keamanan kendaraan penulis selama berada di Kampus Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada Penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak dan Ibu sekalian.
11. Seluruh Penjual yang ada di lingkup kantin Fisip UNHAS (Mace Mia, Mace Lili, Kak Naim dan seluruh Mace tanpa terkecuali) yang setiap saat menyediakan hidangan-hidangan yang menggugah selera demi pasokan energi bagi penulis untuk menghadapi hari-hari dikampus. Semogah tetap diberikan semangat dan ditambah rezekinya oleh Allah SWT.
12. Terima kasih kepada Bapak **Denny Satria Irawa** selaku Pimpinan Cabang Pembantu beserta seluruh pegawai yang telah memberikan informasi penting yang dibutuhkan serta izin untuk melaksanakan penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

13. Terima kasih kepada Bapak **Ahmad Dodi** selaku AOM (account officer mikro) beserta seluruh AOM lainnya karena telah memberikan informasi penting yang dibutuhkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Terima kasih pula yang tinggi tingginya kepada Humanis Fisip UNHAS, KEMA FISIP UH, UKM Sepak Bola Fisip UH, dan UKM Pencak Silat Panca Suci Fisip UH yang telah menjadi rumah kedua serta keluarga baru bagi penulis. Terima kasih banyak atas semua dinamika, pengetahuan dan pengalaman organisasi yang telah diberikan kepada penulis.
15. Saudara tak sedarah UNION 2014 Terima kasih banyak untuk segala kesusahan yang teman teman berikan, segala suka duka yang kita alami bersama, segala kebersamaan yang telah kita lewati. Dari awal yang kita tidak saling mengenal hingga menjadi keluarga yang selalu ada saat susah maupun senang, terima kasih banyak untuk semua cerita dan pengalaman yang diberikan selama kurang lebih 6 tahun ini. Sekali lagi, terima kasih untuk segalanya. Karena kalian bukan lagi sahabat bagiku, tapi saudara yang tak sedarah. Semangat untuk mengejar mimpi kita masing-masing dan semoga kelak kita tidak akan saling melupakan. “Bababa baba nanana naaaa”
16. Untuk teman-teman anggota Departemen Advokasi Dan Pengabdian Masyarakat Humanis Fisip Unhas periode 2016/2017 dan periode 2015/2016 terima kasih atas suka duka yang kita alami bersama, serta ilmu dan pengalaman selama masa kepengurusan.

17. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara MOGM 014 kakanda Creator 07, Bravo 08, Prasasti 010, Brilian 011, Relasi 012, Record 013, serta adik-adik Champion 015, Frame 016, Leader 017, Lentera 018, dan Miracle 019 serta Segenap Keluarga Besar HUMANIS FISIP UNHAS dan KEMA FISIP UNHAS terima kasih banyak atas semua dinamika, pengetahuan serta pengalaman berorganisasi bagi Penulis. Semoga dapat bermanfaat bagi Penulis kedepannya. “Bersama-Bersatu Berjaya Kejayaan Dalam Kebersamaan”
18. Terima kasih kepada teman-teman Avenger’s, yang telah membantu dan memberikan hiburan kepada penulis. Suka duka kita jalani bersama mengarungi kerasnya kehidupan, kalian takkan pernah terlupa dan terganti, tetaplah menjadi Pahlawan, sampai Thanos dan musuh yang lain kita kalahkan. Terima kasih atas segalanya.
19. Untuk Teman-Teman Kloter Terakhir (Amli, Topik, Baktiar, Ilyas, Muhlis, Aceng, Ocan, Ibas, Ical, Purma) terima kasih telah menemani dan memberi semangat satu sama lain agar tetap berjuang untuk mendapat gelar SAP, terima kasih atas segala kekocakan dan kekonyolannya. Tetap jaga kekompakan “Salam Kunci Busi!”
20. Terima kasih kepada teman-teman Decepticon 14 (Awal, Ffandi, Dail, Ical, Baim, Andri, Benyamin, Musa, Mesa, Makky, Rais, Syamsir, Wandu, Topik, Baktiar, Ilyas, Muhlis, Aceng, Ocan, Ibas, Purma, Alif) dan The Strong Girls 14 (Jinang, Nanni, Icup, Tuti, Lisda, Mace, Leli, Anti, Lisa, Bau, Inna, Dian, Nurani) yang senantiasa membuang-buang waktuku untuk tertawa

dan bersedih bersama serta membahas hal-hal receh dengan diskusi yang alot. “Thanks For All”

21. Teman-Teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Bantaeng Gel 99 Universitas Hasanuddin. Terkhusus Teman-Teman KKN Kecamatan Uluere dan terkhusus lagi Teman-Teman di Desa Bonto Marannu (Fahri, Alif, Bil, Igah, Ayyub dan Dila) terima kasih selama ini menjadi keluarga satu bulan di kampung orang, kekocakan dan kekompakan kita takkan terlupakan.
22. Terima kasih kepada Tamalanrea Squad (Obo, Harlan, Muchlis, Awi, Abe, Tito, Nanda, zulbasar, dodi, dan ippang) yang telah menemani tiap harinya untuk bercerita dan saling support dalam permasalahan kuliah. Thanks “For All”.
23. Terima kasih kepada Keluarga besar **IAPIM (ikatan alumni pesantren immim)** 2014 yang telah menjadi ruma kedua dan selalu berbagi suka maupun duka selama kurang lebih 11 tahun dan tetap selalu memberi hiburan dan keseruan keseruan lainnya. “Good luck”
24. Terima kasih kepada pengurus IAPIM periode 2017-2019 yang telah berjuang bersama sama dan berbagi pengetahuan dan pengalaman selama masa kepengurusan.
25. Terima kasih kepada teman teman **IAPIM Putri** angkatan 2014 yang selalu membuat acara masak dan makan makan bersama dan tidak pernah bosan dalam membuat makanan untuk penulis dan teman teman lainnya.

26. Terima kasih kepada teman teman yang tinggal di perumahan marhama berua blok A16 no.15 yang telah menjadikan wadah untuk penulis dalam mengerjakan skripsinya. Thanks for free wifi
27. Semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan doanya. Semoga bantuan dan keikhlasannya mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan terkhusus bagi para pembaca. Akhir kata, Penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Makassar, 20 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
II.1. Konsep Kebijakan Publik	8
II.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	8
II.1.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik	9
II.1.3 Tahap-tahap dalam Perumusan Kebijakan Publik	10
II.2. Konsep Implementasi Kebijakan	15
II.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	15
II.2.2 Konsep Program	22
II.3. Konsep Kredit Usaha Rakyat (KUR)	24
II.3.1 Pengertian Kredit.....	24
II.3.2 Fungsi Kredit	24
II.3.3 Tujuan Kredit	28

II.3.4	Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)	29
II.3.5	Tujuan Pelaksanaan Program KUR.....	30
II.3.6	Sasaran Program KUR.....	31
II.3.7	Manfaat Program K U R.....	31
II.4.	Konsep Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	32
II.4.1	Pengertian UMKM	32
II.4.2	Kriteria UMKM	33
II.4.3	Ciri-ciri UMKM	34
II.4.4	Jenis-jenis UKMKM	35
II.5.	Kerangka Pikir.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

III.1.	Pendekatan Penelitian	39
III.2.	Lokasi Penelitian	39
III.3.	Jenis Penelitian	39
III.4.	Unit Analisis	40
III.5.	Informan Penelitian	40
III.6.	Jenis Sumber Data	41
III.7.	Teknik Pengumpulan Data	41
III.8.	Teknik Analisis Data	42

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENEITIAN

IV.1.	Gambaran Umum PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.....	44
IV.1.1	Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah	44
IV.2.	Visi, Misi, dan Strategi PT. Bank Rakyat Indonesia	46
IV.2.1	Visi Bank BRI	46
IV.2.2	Misi Bank BRI	46
IV.2.3	Strategi BRI Syariah	46
IV.3.	Struktur Organisasi PT.BRI Syariah	47
IV.4.	Tugas Pokok Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Makassar Tamalanrea.....	49
IV.5.	Hasil dan Pembahasan Penelitian	51

IV.5.1 Implementasi Kredit Usaha Rakyat.....	52
IV.5.2 Ketepatan Kebijakan.....	52
IV.5.3 Ketepatan Pelaksana.....	56
IV.5.4 Ketepatan Target.....	59
IV.5.5 Ketepatan Lingkungan.....	63
BAB V KESIMPULAN	
V.1. Kesimpulan.....	65
V.2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pikir.....	38
Gambar IV.1 Struktur Organisasi BRI syariah KCP makassar tamalanrea	48
Gambar IV.2 Standar Aktivitas Harian Insan Mikro BRI syariah.....	57
Gambar IV.3 Daftar Nasabah Penerima KUR.....	60
Gambar IV.4 Alur Pemberian Pembiayaan Ke Nasabah	62

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kesejahteraan penduduk Indonesia dapat dikatakan masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun, menjadikan kesejahteraan penduduk Indonesia perlu ditingkatkan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang. Dibandingkan September 2018, jumlah penduduk miskin menurun 529,9 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2018, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 805,1 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 tercatat sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2018–Maret 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 136,5 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan turun sebesar 393,4 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 6,89 persen menjadi 6,69 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,10 persen menjadi 12,85 persen. (BPS, 2019).

Data menurut Badan Pusat Statistik 2019 tersebut menjelaskan bahwa angka kemiskinan di Indonesia menurun dari tahun 2018 hingga 2019 yang artinya pemerintah selaku badan eksekutif telah mampu mengurangi atau meminimalisir tingkat kemiskinan di Indonesia, akan tetapi angka kemiskinan

tersebut masih tergolong tinggi dan tetap menjadi tugas pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia.

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 71,39. Angka ini meningkat sebesar 0,58 poin atau tumbuh sebesar 0,82 persen dibandingkan tahun 2017. Bayi yang lahir pada tahun 2018 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,20 tahun, lebih lama 0,14 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2018 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,91 tahun (Diploma I), lebih lama 0,06 tahun dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun 2017. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,17 tahun (kelas IX), lebih lama 0,07 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 11,06 juta rupiah per tahun, meningkat 395 ribu rupiah dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya. (BPS, 2019).

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2018. IPM Indonesia meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 71,39 pada tahun 2018. Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,88

persen per tahun dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” mulai tahun 2016. Pada periode 2017–2018, IPM Indonesia tumbuh 0,82 persen.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan tiga program pengentasan kemiskinan, yakni mengenai stabilitas harga, program subsidi dan dana desa, serta bantuan social. Selain itu Jokowi juga menyoroti soal beberapa program di kementerian, seperti program di Kementerian Pertanian, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. (Tambunan, 2009)

UMKM menjadi salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara. Dalam kondisi ekonomi yang belum kondusif, pengembangan kegiatan usaha kecil dan menengah dianggap sebagai salah satu alternatif penting yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. Saat ini peningkatan kinerja UMKM masih dilanda berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi persaingan. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pengusaha UMKM dalam meningkatkan kinerja usahanya adalah keterbatasan modal yang dimiliki. Maka dari itu, UMKM perlu dikembangkan karena, distribusi kesempatan kerja menurut skala usaha menegaskan bahwa

UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. UMKM juga penting sebagai salah satu sumber penciptaan Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk mengatasi masalah modal pada UMKM, pemerintah mencanangkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 dengan didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi untuk menjamin percepatan pelaksanaan serta penyaluran kredit. KUR adalah kredit/pembiayaan UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif yang penyalurannya melalui bank namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana Bank Pemerintah dengan plafon sampai dengan Rp25 juta per debitur. KUR ini ditujukan untuk kelompok-kelompok UMKM karena UMKM mampu menyediakan 99,46 persen lapangan pekerjaan baru. Adapun Bank Pelaksana yang menyalurkan KUR ini adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin. (Sari, dkk, 2018).

PT Bank BRI syariah Tbk merupakan salah satu organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRIsyariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRIsyariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Salah satu bentuk pelayanan PT.Bank BRIsyariah Tbk kepada masyarakat adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui kantor cabang maupun cabang pembantu yang dimilikinya di setiap daerah, salah satunya Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makassar Tamalanrea dengan harapan mampu mengembangkan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lebih optimal.

UMKM adalah salah satu usaha yang dilakukan sebagian masyarakat di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya dalam hal material. Walaupun sebagian besar profesi masyarakat di Kecamatan Tamalanrea adalah sebagai pegawai negeri maupun pegawai swasta tetapi sebagian juga berprofesi sebagai pegiat UMKM. UMKM di Kecamatan Tamalanrea masih terkendala dengan modal sehingga dengan adanya program KUR usaha-usaha kecil dapat terbantu dalam mengembangkan usahanya, mereka hanya perlu melaporkan usaha mereka di Kantor Kecamatan untuk mendapatkan surat keterangan usaha sebagai syarat untuk mengajukan kredit modal usaha pada BRI syariah KCP Tamalanrea.

Program KUR merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM di Kecamatan Tamalanrea. Program KUR dilaksanakan langsung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makassar Tamalanrea melalui program pemberian kredit modal usaha. Berkat adanya KUR pelaku UMKM memperoleh tambahan modal yang berdampak positif dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan pemaparan kondisi diatas, penulis mengangkat judul penelitian yakni **“Efektivitas Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh**

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makassar Tamalanrea”.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah uraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana Efektivitas Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makassar Tamalanrea?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Keefektifan Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makassar Tamalanrea.

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diarahkan kepada :

1. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran intelektual dalam pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan memberikan manfaat atau kontribusi bagi para akademisi atau pihak-pihak lainnya yang berkompeten dalam mencari informasi dan referensi mengenai Efektivitas Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP)
Makassar Tamalanrea.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan saran atau masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil kebijakan mengenai Efektivitas Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makassar Tamalanrea.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Kebijakan Publik

II.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik sebagai keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Selanjutnya kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Kebijakan itu sebagai keputusan yang diambil untuk bertindak dalam rangka memberikan pelayanan publik sesuai dengan norma-norma yang ada pada publik. Norma-norma tersebut menyangkut akan hal interaksi penguasa, penyelenggara negara dengan rakyat serta bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan publik itu dilaksanakan. Ukuran normatifnya adalah keadilan sosial, partisipasi dan aspirasi warga negara, masalah-masalah lingkungan, pelayanan, pertanggungjawaban administrasi dan analisis yang etis.

Kebijakan publik menurut Jenkins (1978) adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh aktor politik atau kelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih, beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan tersebut pada

prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Sedangkan menurut Anderson (2006) kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

II.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Wahab (2012) menjelaskan terdapat empat ciri-ciri yang membuat sesuatu dikatakan sebagai kebijakan publik yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak (at random), asal-asalan, dan serba kebetulan.
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuk yang positif, kebijakan publik mungkin mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-

keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apa pun dalam masalah–masalah di mana campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan.

Adapun Anderson (2006) menjelaskan ada empat ciri-ciri kebijakan publik yakni sebagai berikut :

1. Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan.
2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. namun, ia berkaitan dengan kebijakan dalam masyarakat, berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah..
4. Kebijaksanaan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat mengikutinya.

II.1.3 Tahap-Tahap dalam Perumusan Kebijakan

Sehubungan dengan perumusan kebijakan pelayanan publik, Riawan (2005) mengutarakan perlunya pengambil kebijakan memiliki kepekaan dan kemampuan sebagai berikut:

1. Memahami secara benar tugas pokok dan fungsi.
2. Kemampuan dalam menyusun prioritas, khususnya dalam pengembangan infrastruktur dan pemberian layanan.
3. Kemampuan menyusun alokasi infrastruktur berkait dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan dan kemampuan dalam membuat perencanaan pembangunan infrastruktur dan penganggaran.
4. Kemampuan dalam menyusun standar layanan.
5. Kemampuan melakukan komunikasi dengan masyarakat, sehingga diperoleh masukan yang produktif.

Maka dari itu dalam merumuskan kebijakan terdapat tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu, Winarno (2007) menjelaskan dalam perumusan kebijakan terlahir dari beberapa tahapan atau langkah-langkah mekanisme pembuatan kebijakan, yaitu:

1. Perumusan Masalah

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat.

2. Agenda Kebijakan

Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu

dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk pada agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus dilakukan.

3. Pemilihan Alternatif

Kebijakan untuk Pemecahan Masalah Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut.

4. Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut.

Adapun menurut Mayer (1984) proses penyusunan keputusan dan peranan dari analisis serta perencanaan kebijakan dapat diuraikan dalam langkah-langkah proses penyusunan kebijakan sebagai berikut:

1. Penetapan goals, mengacu kepada pemilihan tujuan-tujuan yang luas dan jangka panjang yang mana kebijakan atau rencana dikembangkan sesuai dengan pencapaian objektifnya.
2. Penilaian kebutuhan, menyajikan elaborasi dari model perencanaan rasional, yang telah mendapat perhatian yang meningkat dengan munculnya perencanaan layanan manusia.
3. Spesifikasi objektif, mengacu kepada penetapan target-target khusus yang dapat dituangkan dalam pelaksanaan, biasanya bersifat kuantitatif dan dapat dicapai dalam perspektif waktu tertentu dan bersumber pada kebijakan atau rencana tertentu.
4. Perancangan perangkat tindakan alternatif, mengacu pada pengembangan atau identifikasi berbagai cara untuk mencapai objektif kebijakan.
5. Perkiraan konsekuensi dari tindakan-tindakan alternatif, mengacu kepada analisis pengaruh-pengaruh positif dan negatif yang dijabarkan dari perangkat tindakan alternatif.
6. Pemilihan perangkat tindakan mengacu kepada penetapan, oleh penyusun kebijakan, perangkat tindakan yang kelihatannya paling tepat untuk mencapai objektivitas.
7. Implementasi mengacu kepada pelaksanaan perangkat tindakan yang dipilih.
8. Evaluasi hasil, mengacu kepada penetapan hasil nyata yang dicapai dengan menjalankan perangkat yang dipilih.

9. Akhirnya evaluasi terhadap hasil kebijakan memberikan proses balasan, dimana hasil-hasil kembali dituangkan dalam proses perencanaan.

Selain dari pendapat diatas, proses pembuatan sebuah kebijakan publik menurut Dunn (1998) terlahir dari beberapa tahapan-tahapan atau langkah-langkah mekanisme pembuatan sebuah kebijakan, yaitu:

1. Hal yang pertama kali adalah gejala atau isu yang menjadi masalah publik, disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni bersifat mendasar yang menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, biasanya berjangka panjang, yang tidak bisa diselesaikan oleh orang seorang dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan.
2. Dari isu kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara.
3. Kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
4. Namun dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

5. Implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang akan dirasakan oleh pemanfaat.
6. Dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk implementasi kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai tahap-tahap dalam perumusan kebijakan publik tersebut ada tiga hal yang pokok berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu:

1. Formulasi kebijakan.
2. Implementasi kebijakan.
3. Evaluasi kebijakan.

II.2. Konsep Implementasi Kebijakan

II.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky dalam Usman (2002) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "*street level bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya

untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat dalam implementasi, maka dari itu ada beberapa teori implementasi.

Dalam pandangan Edwards III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang mana keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni

kompetensi implementor dan sumber daya finansial. sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di negara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya *standard operating procedures* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu

panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Sedangkan menurut Meter & Horn (1975) ada enam variable yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
2. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resource*).
3. Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
4. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor

Dalam pandangan Weimer & Vining (1999) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program yang terjabarkan sebagai berikut:

1. Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.
2. Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan fisik atau geografis.
3. Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan.

Matland dalam Suratman (1995) mengembangkan sebuah model yang disebut dengan Model Matriks Ambiguitas-Konflik yang menjelaskan bahwa implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan secara keseharian operasi birokrasi pemerintah. Kebijakan disini memiliki ambiguitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang rendah. Implementasi secara politik adalah implementasi yang perlu dipaksakan secara politik, karena, walaupun ambiguitasnya rendah, tingkat konfliknya tinggi. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik tinggi.

Pada prinsipnya Matrik Matland memiliki “empat tepat” yaitu:

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari:

- a. Sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah *how exelent is the policy*.
- b. Apakah kebijakan tersebut telah dirumuskan sesuai dengan karakter-karakter masalah yang hendak dipecahkan.
- c. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi) kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

2. Ketepatan pelaksanaan

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*) kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersm masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan-kegiatan masyarakat, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau di mana pemerintah tidak efektif menyelenggarakannya sendiri, seperti pembangunan industri-industri berskala menengah dan kecil yang tidak strategis, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

3. Ketepatan Target

Ketepatan berkenan dengan tiga hal, yaitu:

- a. Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan kebijakan lain.
- b. Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau tidak.
- c. Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.

4. Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu:

a. Lingkungan Kebijakan

Yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Donald J. Calista menyebutnya sebagai *variable endogen*, yaitu *authoritative arrangement* yang berkenan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang berkenan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenan dengan implementasi kebijakan.

b. Lingkungan Eksternal Kebijakan

Lingkungan ini oleh Calista disebut sebagai variable eksogen, yang terdiri dari atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implemenasi kebijakan, *interpretive instution* yang berkenan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan *individuals*, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakn dan implementasi kebijakan.

II.2.2. Konsep Program

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini, program merupakan bagian dari perencanaan, sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Program-program tersebut merupakan sarana pemerintah dalam meningkatkan harkat dan kehidupan rakyat. Berikut pengertian program dari beberapa ahli.

Dalam hierarki kebijakan dikenal istilah program. Beberapa definisi dari program dikemukakan oleh Tjokromidjojo (1990) yang mengemukakan bahwa program adalah cara untuk memilih dan menghubungkan dalam merumuskan tindakan yang kita anggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan Kayatmo (1985) mendefinisikan program sebagai rangkaian aktivitas yang mempunyai saat permulaan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapatkan suatu tujuan.

Selain itu adapun definisi program yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan bahwa:

“Program adalah instrumen kebijakan yang berisi suatu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi, anggaran atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat”

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program adalah suatu jenis rencana yang konkret karena didalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur anggaran dan waktu pelaksanaan.

Suatu program pembangunan yang baik, menurut Tjokroamidjojo (1990) harus mempunyai sedikit ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tujuan yang dirumuskan
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek-proyek yang saling terkait untuk mencapai tujuan program seselektif mungkin.
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan rogram tersebut.
5. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pemerintah dan program pembangunan lainnya.
6. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

Dalam proses pelaksanaan suatu program kenyataan yang sesungguhnya, dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes, karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran program.

Dapat disimpulkan bahwa sebelum suatu program diimplementasikan, terlebih dahulu harus diketahui secara jelas mengenai uraian pekerjaan yang dilakukan secara sistematis, tata pelaksanaan, jumlah anggaran yang dibutuhkan dan kapan waktu pelaksanaannya agar program yang direncanakan dapat mencapai target yang sesuai dengan keinginan.

II.3 Konsep Kredit Usaha Rakyat (KUR)

II.3.1 Konsep Kredit

Menurut Hasibuan (2006) kredit berasal dari bahasa Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya, kreditur percaya bahwa kredit itu tidak akan macet.

Lebih lanjut Hasibuan (2006) menjelaskan prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Indikator kepercayaan ini adalah kepercayaan moral, komersial, finansial dan agunan. Kepercayaan dibedakan atas kepercayaan murni dan kepercayaan *reserve*.

1. Kepercayaan murni adalah jika kreditur memberikan kredit kepada debiturnya hanya atas kepercayaan saja, tanpa ada jaminan lainnya.
Misalnya: Masyarakat menabung uangnya pada suatu bank hanya

atas kepercayaan saja, karena bank hanya memberikan tanda bukti berupa bilyet deposito, blanko buku cek, atau bilyet giro kepada penabungnya. Jika banknya dilikuidasi, penabung hanya memiliki bilyet deposito atau blanko bilyet giro saja.

2. Kepercayaan *reserve* diartikan kreditur menyalurkan kredit/pinjaman kepada debitur atas kepercayaan, tetapi kurang yakin sehingga bank selalu meminta agunan berupa materi (seperti BPKB dan lain-lain). Bahkan suatu bank dalam penyaluran kredit lebih mengutamakan agunan atas pinjaman tersebut.

Menurut UU RI No.7 Tahun 1992 tentang perbankan Bab I, Pasal 1, ayat (12) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

II.3.2 Fungsi Kredit

Sinungan (1992) menjelaskan bahwa fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang;
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari barang;
3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
4. Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi;
5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat;

6. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional;
7. Kredit adalah juga sebagai alat hubung ekonomi internasional.

Kemudian Kasmir (2004) menjelaskan bahwa ada delapan fungsi kredit, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.

2. Untuk Meningkatkan Peredaran Dan Lalu Lintas

Uang Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menabuh jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

6. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi si nasabah yang memegang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat memperoleh pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekerja di pabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik.

8. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit.

Menurut Untung (2005) kredit dalam kehidupan perekonomian sekarang, dan juga dalam perdagangan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang.
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

4. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Meningkatkan hubungan internasional.

II.3.3 Tujuan Kredit

Hasibuan (2006) menjelaskan bahwa terdapat beberapa tujuan penyaluran kredit, antara lain untuk:

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kreditur;
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada;
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank;
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat;
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran;
6. Menambah modal kerja perusahaan;
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun menurut Kasmir (2004) tujuan pemberian suatu kredit antara lain sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor rill.

Menurut Simorangkir (2000) tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank adalah sebagai berikut:

1. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

II.3.4 Kredit Usaha Rakyat

Berdasarkan peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendefinisikan KUR sebagai kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau

kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Lebih lanjut Tulung (2012) menjelaskan bahwa KUR adalah dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit dari Rp.5 juta sampai dengan Rp.500 juta. Agunan pokok KUR adalah usaha yang dibiayai, namun pemerintah membantu menanggung melalui program penjaminan hingga maksimal 70 persen dari plafon kredit. Bantuan berupa fasilitas pinjaman modal ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lain yang bersifat informal.

II.3.5 Tujuan Pelaksanaan Program KUR

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
2. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan Koperasi kepada Lembaga Keuangan
3. Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

II.3.6 Sasaran Program KUR

Berdasarkan peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengatur penerima KUR terdiri dari:

1. Usaha mikro, kecil, dan menengah;
2. Calon tenaga kerja indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
3. Calon pekerja magang di luar negeri;
4. Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja indonesia;
5. Tenaga kerja indonesia yang purna bekerja di luar negeri;
6. Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
7. Usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain; dan/atau
8. Kelompok Usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.

II.3.7 Manfaat KUR

Bagi UMKMK, manfaat KUR adalah membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Sementara bagi pemerintah, manfaat KUR adalah tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi.

II.4 Konsep Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

II.4.1 Pengertian UMKM

Menurut Rudjito, pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

Kemudian Menurut Ina Primiana, pengertian UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu;

1. Industri manufaktur
2. Agribisnis
3. Bisnis kelautan
4. Sumber daya manusia

Selain itu, Ina Primiana juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Kemudian M. Kwartono menjelaskan pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tana dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia.

II.4.2 Kriteria UMKM

Untuk mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan perlu memperhatikan kriteria-kriterianya terlebih dahulu. Hal ini penting digunakan untuk pengurusan surat izin usaha kedepannya dan juga menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM.

Berikut masing-masing pengertian UMKM dan kriterianya:

1. Usaha Mikro

Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro.

Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,-

2. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah.

Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis

setiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,-

3. Usaha Menengah

Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp500.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp2,5 .000.000,- milyar sampai Rp50.000.000.000,-.

II.4.3 Ciri-Ciri UMKM

UMKM didalam pelaksanaannya itu memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik ini bertujuan untuk dapat membedakan UMKM dengan jenis usaha lainnya. Disebabkan karena UMKM sendiri merupakan bentuk usaha yang berbeda dengan jenis usaha biasanya. dibawah ini merupakan ciri-ciri dari UMKM diantaranya sebagai berikut :

1. Jenis komoditi/ barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu.
2. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu.

3. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan.
4. Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni.
5. Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah.
6. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank.
7. Pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP.

II.4.4 Jenis-Jenis UMKM

Didalam pelaksanaannya, UMKM ini memiliki beberapa jenis. Jenis ini berfungsi untuk bisa membagi beberapa jenis UMKM supaya mudah apabila menerima ijin usaha dari pemerintah. Dibawah ini merupakan beberapa jenis dari UMKM:

1. Usaha Dibidang Kuiner

Kuliner merupakan suatu usaha yang bergerak dalam segala macam bidang makanan dan minuman. Kuliner tersebut dapat dijadikan sebagai UMKM jika usaha penjualan makanan itu masih dalam lingkup UMKM yang mengutamakan penjualan dalam jumlah mikro (kecil).

2. Usaha Dibidang Fashion

Fashion merupakan suatu usaha di bidang pakaian. Salah satu dari kebutuhan pokok manusia ialah pakaian. Usaha fashion ini merupakan usaha yang menjanjikan disebabkan karena tiap-tiap

orang membutuhkan pakaian. Namun untuk usaha fashion yang termasuk ke dalam UMKM harus masuk kriteria UMKM seperti pada penjelasan diatas.

3. Usaha Dibidang Agribisnis

Agribisnis merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang pertanian. UMKM yang menjalankan mengenai agribisnis ini umumnya menjual pupuk, bibit tanaman, pestisida, serta lain-lain. UMKM agribisnis tersebut juga biasanya terdapat di pedesaan yang mempunyai lahan pertanian dalam jumlah cukup banyak dan juga luas.

Kemudian seiring berkembangnya zaman jenis-jenis UMKM juga semakin bertambah dilihat dari kekreatifan manusia dalam menginovasi suatu bidang usaha yang menjadi kebutuhan manusia juga, diantara lain jenis-jenis UMKM yang bertambah dan banyak diminati oleh masyarakat, yaitu:

1. Usaha Dibidang Pendidikan

Usaha di bidang pendidikan merupakan salah satu jenis UMKM yang masih sangat terbuka peluangnya. Sebagaimana kita tahu saat ini bahwa pendidikan sangat menjadi prioritas. Selain belajar di sekolah, orang tua juga berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak melalui bimbel (bimbingan belajar). Dengan mengikutsertakan dalam bimbel diharapkan anak akan bisa mengasah kemampuan dibidang akademik.

2. Usaha Dibidang Otomotif

Membuka usaha dibidang otomotif bisa menjadi pilihan yang tepat. Tentunya akan menimbulkan suasana tersendiri membuat usaha dari hal yang disukai. Melihat besarnya produksi kendaraan maka

kebutuhan-kebutuhan otomotif dalam hal ini adalah perbaikan alat atau pergantian barang otomotif juga meningkat. Maka besar peluang bagi UMKM untuk menggeluti usaha tersebut.

3. Usaha Kerajinan Tangan

Geliat usaha usaha mikro kecil dan menengah dibidang kerajinan tangan tentu bisa menjadi salah satu peluang yang dimanfaatkan. Usaha yang hanya membutuhkan modal kreatifitas dan inovasi. Bahan dasarnya bisa diperoleh dengan mudah dan gratis. Banyak sekali UMKM kerajinan barang bekas yang mampu bersaing dengan produk pabrikan

4. Usaha Dibidang Teknologi Internet

Di era digital yang sarat informasi tentunya sangat tepat jika menjalankan bisnis yang berbasis internet. Banyak sekali orang yang membutuhkan internet. Berbagai informasi dan konten-konten yang informatif dan menghibur bisa diperoleh melalui internet. Didukung dengan kecanggihan smartphone dan koneksi internet yang cukup stabil tentunya memulai bisnis UMKM dalam bidang ini bukan merupakan hal sulit. Bisnis berbasis internet digital atau dikenal dengan startup akhir-akhir ini mulai mengeliat. Hal ini dikarenakan banyaknya kebutuhan akan informasi dan sarana entertainment bagi peminatnya.

5. Usaha Elektronik dan Gadget

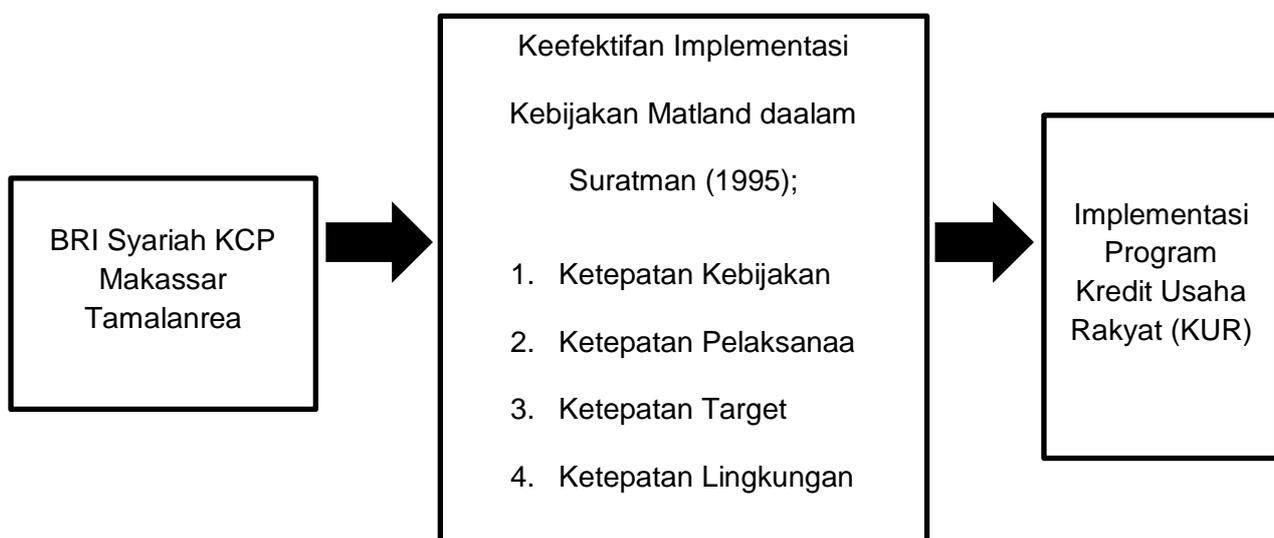
Era informasi digital tentunya akan diikuti dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Salah satunya dengan keberadaan perangkat canggih pendukung teknologi. Jika beberapa tahun

belakangan notebook dan laptop menyerang industri pasar kita. Untuk saat ini, pasar kita sedang diserbu oleh gadget dan smartphone canggih. Harga yang ditawarkan beragam mulai dari harga murah, hingga harga yang mahal namun kualitas dan kecepatan akses yang mumpuni. Tentunya, hal ini bisa menjadi salah satu UMKM yang menjanjikan.

II.5. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu dasar terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan dan menggunakan teori sebagai landasan yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kerangka pemikiran mestinya harus jelas dan mudah dipahami. Berdasarkan sebelumnya, telah dijelaskan pada BAB I mengenai rumusan masalah penelitian ini. Untuk menjawab masalah tersebut menggunakan teori dari Matland (1995) bahwa ada “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan.

Gambar II.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan menggambarkan realita empirik dengan yang ada dalam suatu fenomena secara rinci dan mendalam. Adapun penelitian kualitatif dalam penyajian data berupa wawancara, dokumen resmi maupun pribadi, catatan lapangan, dan bukan berupa angka-angka. dan selanjutnya digunakan teknik deskriptif untuk mengetahui dan menggambarkan tentang bagaimana Efektivitas Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makassar Tamalanrea.

III.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan lebih mudah untuk jangkauan informasi dan pengumpulan data, serta dianggap perlu untuk melakukan penelitian mengenai Efektivitas Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makassar Tamalanrea.

III.3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menguraikan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

III.4. Unit Analisis

Sehubungan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka yang menjadi unit analisis adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan bagaimana implementasi KUR sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk menyalurkan KUR kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar dapat meningkatkan kualitas perekonomian khususnya di Kecamatan Tamalanrea.

III.5. Informan

Informan adalah orang-orang yang paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi mengenai Efektivitas Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makassar Tamalanrea. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Makassar Tamalanrea:
 - a. Kepala Cabang BRI Syariah
 - b. *Akun Officer Mikro (AOM)*
2. Pelaku UMKM:
 - a. Usaha dibidang kuliner
 - b. Usaha dibidang otomotif
 - c. Usaha dibidang elektronik dan gadget
 - d. Usaha dibidang teknologi internet
 - e. Usaha dibidang fashion

III.6. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dimana data yang didapatkan dapat berupa teks, foto, angka, cerita, gambar, dan bukan berupa angka hitung-hitungan (Raco, 2010).

Maka dari itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dari narasumber atau informasi yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.
2. Data sekunder adalah sebagian data pendukung data primer dari literature dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi atau instansi dengan permasalahan dilapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian

III.7. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data dan informasi serta keterangan-keterangan bagi kepentingan penulis, selanjutnya maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui panca indra.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara langsung dengan informasi yang telah ditetapkan sesuai dengan kapasitas, pengalaman, dan pengetahuan masing-masing. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

3. Dokumentasi.

Telaah dokumen yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Telaah dokumen dilakukan dengan jalan melakukan penelusuran terhadap beberapa dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian guna mendapatkan data sekunder yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan, yaitu yang berhubungan dengan teori-teori, undang-undang dan dokumen yang relevan.

III.8. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu analisis data yang kemudian memberikan jawaban dari penelitian yang dilakukan. Adapun metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles & Huberman (1992) yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap informan yang kompatibel terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.

2. Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.
3. Penyajian data (*data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.